

Soliditas Partai dan Stabilitas Perolehan Suara: Konsolidasi Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Umum Legislatif 2014

JISPO
Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
2020, Vol. 10, No. 1: 105-125
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index>
© The Author(s) 2020

Dyah Mely Anawati*

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Ridho Al-Hamdi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Abstrak

Artikel ini membahas soliditas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui konsolidasi kelembagaan untuk mempertahankan kestabilan perolehan suara pada Pemilihan Umum Legislatif 2014. Konsolidasi kelembagaan dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq, pada awal tahun 2013 terkait dengan kasus penyuapan kuota impor daging sapi. Ternyata, PKS memperoleh 6.79 persen suara pada Pemilu Legislatif 2014. Ini berarti sedikit turun sebesar 1.09 persen dibanding pemilu sebelumnya tahun 2009 yang mencapai 7.88 persen. Kajian ini menggunakan riset kualitatif dengan pendekatan teori kelembagaan partai. Pengumpulan data menggunakan berita media daring, data KPU dan rujukan lain yang relevan. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa PKS masih dapat mempertahankan soliditas organisasinya meskipun banyak survei memprediksi kealahannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan kebertahanan dalam empat indikator utama: kepemimpinan prosedural, mekanisme resolusi konflik yang dikelola dengan baik, sistem kaderisasi dan komitmen kuat terhadap nilai dan ideologi yang dianut bersama.

Kata-kata Kunci

Soliditas, konsolidasi kelembagaan, PKS, partai Islam, Pemilihan Umum Legislatif

Abstract

This article discusses the solidity of Partai Keadilan Sejahtera (Prosperous Justice Party, PKS) which succeeded in defending the

*Penulis untuk korespondensi:

Dyah Mely Anawati

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: dyah.mely@gmail.com

stable vote in the 2014 legislative election after Indonesia's Corruption Eradication Commission arrested the PKS president, Luthfi Hasan Ishaq, in the early of 2013 due to the case of beef import bribery. In fact, PKS earned 6.79 percent in the 2014 election, which means it only decreased 1.09 percent from the previous 2009 election, which reached 7.88 percent. This article is qualitative research. The required data were collected online by consulting media news, the KPU's data, and other relevant references. The finding demonstrates that PKS was able to maintain its solidity and stable vote in the 2014 legislative election through organizational consolidation although surveys predicted its defeat. This organizational consolidation was conducted by the following measures: procedural leadership, a well-managed conflict resolution mechanism, systematic candidateship, and a strong commitment upon the party values (ideology).

Key Words

Solidity, organizational consolidation, PKS, Islamic party, legislative election

Pendahuluan

Sejak didirikan tahun 1998, Partai Keadilan (PK) yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai baru yang paling banyak mendapat perhatian (Damanik 2002; Machmudi 2006). PKS dinilai sebagai salah satu partai yang menjalin hubungan solid dengan massa pendukungnya. Penetrasi ruang yang luas partai ini dibentuk melalui kemampuannya dalam menyampaikan isu-isu kesejahteraan terhadap konstituennya yang berbasis komunitas (Hamayotsu 2011). Kenaikan perolehan suara nasional PKS yang sangat signifikan pada Pemilu Legislatif 2004 dengan 7,34% yang sebelumnya hanya 1,35% pada Pemilu Legislatif 1999 menjadikan partai ini semakin populer di tengah masyarakat. Kenaikannya bahkan terus berlanjut pada Pemilu Legislatif 2009 yang mencapai angka 7,88%. Sebuah angka yang membuat partai dakwah ini masuk di jajaran partai menengah dan mampu melampaui capaian suara partai lain yang lebih senior (Hasan 2012).

Setelah kenaikan drastis ini, PKS mendapatkan ujian berat. Pada awal tahun 2013 atau setahun jelang Pemilu Legislatif 2014, Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq (LHI) ditetapkan sebagai tersangka kasus suap daging impor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masyarakat Indonesia dibuat kaget oleh kasus yang menimpa pucuk pimpinan partai Islam ini. Citra PKS sebagai partai yang “bersih, peduli dan profesional” seperti hancur seketika. Di tengah konflik internal yang mendera PKS terkait pragmatisme strategi politik terbuka tahun 2008 (Hilmy 2010), kasus suap daging impor ini semakin menambah berat elektabilitas partai tersebut di masyarakat. Banyak pengamat politik dan lembaga survei yang

memprediksi akan anjloknya perolehan suara PKS dalam Pemilu Legislatif 2014 bahkan terancam tidak lolos ambang batas suara sebesar 3,5%.

Namun, prediksi pengamat dan lembaga survei tersebut ternyata tidak terbukti. Perolehan suara PKS pada Pemilu Legislatif 2014 ternyata mencapai 6,79%, turun sebesar 1,09% dibanding Pemilu Legislatif 2009. Ini merupakan sebuah capaian suara yang cukup besar bila melihat capaian suara partai lain yang tidak ditimpa kasus korupsi sebesar PKS. Ini adalah sebuah indikator yang menunjukkan kuatnya daya tahan PKS sebagai partai kader yang militan dalam mempertahankan soliditas internal partai. Karena itu, muncul pertanyaan yang penting diajukan: Bagaimana konsolidasi kelembagaan internal yang dilakukan PKS pada Pemilu Legislatif 2014? Apa saja yang dilakukan PKS dalam melakukan konsolidasi internal agar tetap solid dan kuat? Mengapa soliditas PKS berhasil terjaga dengan baik pada Pemilu Legislatif 2014?

Dengan demikian, artikel ini mengkaji konsolidasi kelembagaan PKS pada Pemilu Legislatif 2014. Kajian dilakukan dengan menggunakan data kepustakaan yang bersumber dari liputan media dan dokumen arsip organisasi partai. Untuk menganalisis data, digunakan pendekatan teori kelembagaan partai secara internal dari Randall dan Svåsand (2002:5-29). Pendekatan ini menekankan pentingnya kelembagaan partai dilihat dari dimensi internal berupa kesisteman (*systemness*) dan penguatan nilai (*value infusion*), dan dimensi eksternal berupa otonomi keputusan (*decisional autonomy*) dan reifikasi (eksistensi partai dalam imaginasi publik). Konsolidasi kelembagaan PKS dalam Pemilu Legislatif 2014 tidak lepas dari kedua dimensi kelembagaan partai tersebut sebagai bagian dari usaha menjaga soliditasnya dalam Pemilu Legislatif 2014.

Studi tentang konsolidasi kelembagaan PKS pada ajang Pemilu Legislatif 2014 ini penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa daya tahan partai menghadapi tekanan citra negatif akibat ulah kader partai salah satunya ditentukan oleh konsolidasi internal partai itu sendiri. Meskipun citra negatif terus dihembuskan, hal itu tidak berpengaruh banyak ketika konsolidasi kelembagaan internal partai berjalan secara solid. Hal ini dibuktikan oleh konsolidasi PKS menghadapi citra negatif pasca merebaknya kasus suap impor daging sapi yang melibatkan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq (LHI), satu tahun menjelang Pemilu Legislatif 2014. Artikel ini berargumen bahwa meskipun banyak pengamat meramalkan kemerosotan partai dakwah tersebut dalam Pemilu Legislatif 2014, ternyata citra negatif itu relatif tidak terpengaruh besar terhadap perolehan suara PKS pada Pemilu Legislatif 2014 disebabkan oleh konsolidasi internal kelembagaan PKS berjalan secara solid dan kuat. Konsolidasi kelembagaan partai yang solid terlihat dari penegakan kesisteman dan nilai ideologi partai. Ia diwujudkan ke dalam gerak cepat perubahan kepemimpinan pasca LHI, mekanisme resolusi konflik internal yang dikelola dengan baik, rekrutmen kader yang sistematis dan transparan serta komitmen kuat seluruh kader partai terhadap nilai dan ideologi yang dianut bersama.

Sejauh pengetahuan kami, tampaknya tidak banyak yang mengkaji masalah konsolidasi kelembagaan partai di Indonesia. Beberapa kajian tentang PKS umumnya membahas tentang dilema partai Islam ini sebagai gerakan sosial-politik yang memperjuangkan syariah di satu sisi dan upaya peningkatan suara di sisi lain (Muhtadi 2012). Beberapa kajian lainnya memfokuskan pada sisi kesejarahan PKS yang berasal dari gerakan Tarbiyah (Damanik 2002; Machmudi 2006), pengaruh ideologi Islamisme di Timur Tengah seperti Ikhwanul Muslimin (Rahmat 2008; Nurdin 2019), perbandingan PKS dengan PAS di Malaysia dan SKP di Turki (Nurdin 2009; Hidayat 2012), sikap politik PKS terhadap kasus yang menjerat LHI (Arifin 2014) dan faktor ideologi dalam perilaku politik PKS (Permata 2008). Karena itu, untuk memberikan kontribusi bagi literatur tentang PKS, artikel ini memfokuskan pada konsolidasi kelembagaan PKS pada Pemilu Legislatif 2014 yang belum banyak disentuh oleh para sarjana sebelumnya.

Konsolidasi Kelembagaan Partai dalam Pemilu

Dalam istilah politik, konsolidasi seringkali dihubungkan dengan sistem demokrasi, sehingga lebih dikenal dengan istilah konsolidasi demokrasi. Istilah ini dimaksudkan sebagai upaya memperkuat kelembagaan sistem demokrasi yang berkelanjutan, baik dalam arti aturan demokrasi maupun fungsi proses demokrasi yang berkesinambungan (Wessels dan Klingemann 2006:12). Dalam artikel ini, kata konsolidasi (*consolidation*) dimaksudkan sebagai upaya aktor dan pendukung dalam memperteguh dan memperkuat kelembagaan partai di tengah persaingan politik berupa pemilihan umum (pemilu).

Pemilu merupakan salah satu instrumen terpenting dalam sistem politik-demokrasi modern. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu bahkan dianggap lambang sekaligus tolok ukur dari demokratis atau tidaknya suatu negara. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilu tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya (Budiardjo 2008: 461). Sistem pemilihan umum di Indonesia perlahan telah berkembang ke arah yang lebih demokratis sejak reformasi tahun 1998. Jika di era Orde Baru (1966-1998), pemilu didasarkan pada sistem politik yang tertutup dan tersentralisasi pada partai, maka pada pasca reformasi 1998, pemilu didasarkan pada pemilu terbuka yang didasarkan pada calon anggota legislatif (Aspinall & Berenschot 2019:9).

Pemilu Legislatif 2004 merupakan sebuah lompatan sejarah dalam politik Indonesia karena untuk pertama kalinya menggunakan sistem proporsional terbuka sehingga rakyat lebih banyak terlibat dalam proses politik multi-partai. Pemilu Legislatif 2004 diikuti oleh 24 partai dan hanya 7 partai yang lolos ke DPR, yaitu Partai Golkar, PDIP, PKB, PPP, Partai Demokrat, PKS, dan PAN (Budiardjo 2008: 454). Hal ini kemudian berlanjut pada Pemilu Legislatif 2009 yang diikuti oleh 51 dan hanya 9 partai yang lolos ambang batas perolehan suara 2,5%, yaitu Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra dan Hanura. Sedangkan

pada Pemilu Legislatif 2014 yang diikuti oleh 12 partai, hanya 10 partai yang dinyatakan memenuhi ambang batas 3,5% perolehan suara, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, Nasdem, PKS, PPP dan Hanura.

Setiap partai politik memiliki strategi yang berbeda-beda untuk memperoleh suara tinggi dalam pemilu. Partai politik umumnya melakukan konsolidasi kelembagaan sebagai bagian dari strategi kemenangan pemilu yang akan dihadapinya. Bentuk konsolidasi kelembagaan partai politik tersebut memiliki dua dimensi, yakni internal dan eksternal. Dimensi internal meliputi konsolidasi struktur dan konsolidasi agenda politik (ideologis), sedangkan dimensi eksternal meliputi konsolidasi vertikal dan konsolidasi horizontal (Noor 2012).

Hal yang sama dinyatakan oleh Randall dan Svåsand (2002:5-29) yang menegaskan pentingnya konsolidasi kelembagaan partai dilihat dari dimensi internal dan eksternal. Dimensi internal menekankan pada aspek struktural berupa kesisteman (*systemness*) dan aspek sikap berupa penguatan nilai (*value infusion*). Sedangkan dimensi eksternal terdiri dari aspek struktural berupa otonomi keputusan (*decisional autonomy*) dan aspek sikap atau pendirian berupa reifikasi (eksistensi partai dalam imajinasi publik).

Aspek struktural dalam dimensi internal berupa kesisteman mencakup peningkatan jangkauan, kepadatan dan keteraturan interaksi yang terdapat dalam partai. Sedangkan aspek sikap dalam dimensi internal berupa penguatan nilai, mencakup sejauh mana aktor dan pendukung partai memperoleh sebuah identifikasi dan komitmen terhadap partai yang melebihi insentif keterlibatan diri dalam partai. Adapun aspek struktural dalam dimensi eksternal berupa otonomi keputusan menunjukkan kebebasan partai dari intervensi pihak manapun dalam menentukan kebijakan dan strategi politiknya. Hal ini terkait dengan aspek sikap dalam dimensi eksternal berupa reifikasi atau sejauh mana eksistensi partai ditanamkan dalam imajinasi publik. Ia menjadi gambaran horizon politik, individu dan kelembagaan partai yang mengatur harapan dan aspirasinya di masyarakat (Randall dan Svåsand 2002:13-14).

Salah satu partai politik yang menunjukkan konsolidasi kelembagaan partai yang kuat dan solid adalah PKS. Sejak didirikan di tahun 1998, PKS memiliki soliditas cukup baik dalam menghadapi persaingan politik di Indonesia. Sebagai salah satu partai politik berbasis Islam, PKS, misalnya, mampu mempertahankan soliditasnya di tengah konflik internal partai pasca Mukernas Bali, 1-3 Februari 2008. Konflik antara faksi keadilan dan faksi kesejahteraan muncul berkaitan dengan strategi politik terbuka PKS dalam perekrutan calon anggota legislatif dari kalangan non-Muslim sebagai bagian dari strategi marketing partai setelah sukses pada Pemilu Legislatif 2004 (Muhtadi 2012:224).

Konsolidasi kelembagaan PKS yang paling krusial adalah pasca penangkapan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq (LHI) oleh KPK dalam kasus suap impor daging impor pada awal tahun 2013 atau satu tahun jelang Pemilu Legislatif 2014. Dalam persidangan di pengadilan, LHI terbukti menerima suap sebesar Rp 1,3

miliar dari Direktur Utama PT. Indoguna Utama terkait penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Ia kemudian divonis 18 tahun penjara dan mendapatkan pencabutan hak politik (Widjojanto 2017:34). Kasus LHI menampar citra PKS sebagai partai Islam yang didukung oleh kaum muda berbasis gerakan tarbiyah. Slogan PKS sebagai partai yang bersih, peduli dan profesional hanya dianggap omong kosong.

Kemudian, sejumlah lembaga survei meyakini bahwa perolehan suara PKS di Pemilu Legislatif 2014 akan turun drastis. Hasil survei Litbang Kompas pada Juli 2012 di 33 provinsi yang menunjukkan suara PKS turun drastis ke angka 2,5 persen. Survei Kompas ini mengambil sampel sebanyak 1.008 dengan *sampling error* kurang-lebih 3,1 persen. Terdapat pula hasil survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada Januari 2014 yang menyatakan bahwa terdapat empat partai politik yang elektabilitasnya rendah dan terancam tidak lolos ambang batas parlemen, yaitu PKS sebesar 2,2 persen, Partai Nasdem 2 persen, Partai Bulan Bintang (PBB) 0,7 persen dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 0,5 persen. Menurut peneliti LSI, Adjie Alfaraby, PKS akan mampu menembus ambang batas parlemen jika bekerja keras, karena partai ini dinilai memiliki soliditas organisasi dan militansi kader yang cukup kuat.

Namun, prediksi sejumlah lembaga survei tersebut ternyata meleset. Hasil rekapitulasi resmi KPU pada Pemilu Legislatif 2014 menunjukkan bahwa perolehan suara PKS masih berada di angka aman, yaitu 6,79 persen (<https://pemilu2014.kpu.go.id>). Partai ini ternyata hanya mengalami penurunan sebesar 1,09 persen dari Pemilu Legislatif 2009 yang mencapai 7,88 persen.

PKS tampak mampu melakukan konsolidasi kelembagaan dengan cepat meski diterpa kasus besar LHI setahun jelang Pemilu Legislatif 2014. Konsolidasi kelembagaan PKS, seperti akan dijelaskan, terlihat dalam konsolidasi yang diwujudkan ke dalam gerak cepat perubahan kepemimpinan pasca LHI, mekanisme resolusi konflik internal yang dikelola dengan baik, rekrutmen kader yang sistematis dan transparan serta komitmen kuat seluruh kader partai terhadap nilai dan ideologi yang dianut bersama. Konsolidasi kelembagaan partai ini mampu mempertahankan posisi PKS sehingga tetap berada dalam posisi partai menengah. Sebuah pencapaian partai berbasis kader dalam menyeimbangkan posisinya untuk lolos dari terpaan citra negatif yang berpengaruh terhadap elektabilitas partai.

Konsolidasi Kelembagaan PKS dalam Pemilu Legislatif 2014

Konsolidasi kelembagaan PKS dalam Pemilu Legislatif 2014 dapat dilihat pada empat indikator utama, yaitu kepemimpinan prosedural, mekanisme resolusi konflik, sistem pengkaderan, dan komitmen terhadap nilai dan ideologi. Keempat indikator tersebut merupakan perwujudan dari apa yang disebut oleh Randall dan Svåsand (2002:13) sebagai dimensi internal dan eksternal dalam kelembagaan partai. Perubahan cepat kepemimpinan pasca LHI, mekanisme resolusi konflik internal yang dikelola dengan baik dan rekrutmen kader yang sistematis dan

transparan menunjukkan penguatan kesisteman (*systemness*) partai secara struktural. Hal ini kemudian semakin juga diperkokoh dengan komitmen kuat seluruh kader partai terhadap nilai dan ideologi yang dianut bersama sebagai penguatan nilai (*value infusion*) dalam sikap dan pendirian.

Kepemimpinan Prosedural

Terdapat dua parameter dalam indikator ini, yakni struktur kepengurusan dan keberadaan tokoh karismatik di tubuh PKS. Hal ini secara spesifik terkait dengan proses pengambilan keputusan dalam struktur kepengurusan partai dan munculnya sosok karismatik yang memiliki andil dalam soliditas partai. Di sini terlihat bahwa PKS berupaya melakukan konsolidasi kelembagaan partai terutama dari sisi aspek struktural dimensi internal partai (Randall dan Svåsand 2002:13). PKS berusaha memperkuat kembali kesisteman partai secara struktural kepengurusan berupa peningkatan jangkauan kelembagaan dan keteraturan interaksi internal partai di tengah isu citra negatif yang mendera partai akibat ulah kadernya sendiri.

Penetapan LHI sebagai tersangka pada tanggal 31 Januari 2013 diikuti oleh pengunduran dirinya dari jabatan Presiden PKS. Kemudian, Majelis Syura PKS yang dipimpin oleh K.H. Hilmi Aminuddin dengan cepat melangsungkan rapat pergantian posisi Presiden PKS tersebut. PKS berusaha membendung laju citra negatif yang menimpa pucuk pimpinannya dengan mengokohkan kesisteman partai secara struktural. Proses rapat internal partai awalnya berjalan cukup alot hingga akhirnya kemudian muncul beberapa nama calon seperti Al Muzamil Yusuf, Sohibul Iman, Anis Matta dan Hidayat Nur Wahid. Nama-nama tersebut diajukan oleh anggota Majelis Syura.

Dari keempat nama tersebut, kemudian mengerucut menjadi dua nama, yakni Anis Matta dan Hidayat Nur Wahid. Anis Matta sebagai sekjen PKS selama tiga periode memiliki rekam jejak yang cukup baik. Hanya saja ia sempat dikhawatirkan tersandung kasus hukum karena ia pernah diperiksa dalam kasus dugaan suap PPID (Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah) pada awal tahun 2012 dengan tersangka Wa Ode Nurhayati. Sedangkan Nur Wahid sudah pernah menjabat sebagai Presiden PKS pada periode 2000-2004. Akhirnya, Majelis Syura memutuskan memilih Anis Matta sebagai pengganti LHI mengingat Anis terbukti tidak terlibat dalam kasus suap PPID. Setelah ditetapkan sebagai Presiden PKS, Anis Matta kemudian mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Ketua DPR RI dan keanggotaannya di DPR RI.

Ketua Majelis Syura yang saat itu dipimpin oleh K.H. Hilmi Aminuddin memiliki peran yang dominan di PKS. Ia, misalnya, berwenang mengajukan nama-nama Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Presiden, Sekjen, Bendahara Umum dan Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) untuk ditetapkan dalam musyawarah Majelis Syura. Di samping itu, Ketua Majelis Syura juga memimpin Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) atau Majelis Riqabah 'Amnah (MRA) yang berfungsi sebagai Badan Pekerja Majelis Syura (MPP PKS 2008: 592). Karena

besarnya pengaruh Ketua Majelis Syura tersebut, media seringkali menyebut Hilmi Aminuddin sebagai *the godfather* di tubuh PKS.

Selain menunjuk Anis Matta sebagai Presiden PKS, rapat Dewan Tingkat Pimpinan Pusat PKS juga memutuskan pergantian struktur internal lainnya. Sekretaris Jenderal yang sebelumnya diisi oleh Anis Matta kemudian diganti oleh Muhammad Taufik Ridho. Diketahui sebelumnya, Taufik Ridho menjabat sebagai Ketua DPP PKS Bidang Kepemudaan. Hilmi Aminuddin mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah digelar rapat oleh Majelis Syura pada 31 Januari 2013. Penetapan Sekjen DPP baru tersebut akan dilaporkan ke Majelis Syura dalam musyawarah Majelis Syura mendatang.

Gambar 1

Keputusan Majelis Syura PKS dalam Pergantian Struktur Kepengurusan



Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan Gambar 1, kepemimpinan prosedural PKS dalam konteks jelang Pemilu Legislatif 2014 lebih dikontrol secara penuh dan didominasi oleh Majelis Syura. Majelis Syura mempunyai peran sentral yang cukup kuat dalam penentuan pergantian internal partai. Pemilihan dua kader terbaik PKS, Anis Matta dan Taufik Ridho dilakukan dengan begitu cepat pasca penetapan LHI menjadi tersangka agar tidak ada kekosongan kekuasaan dan situasi internal partai kembali stabil.

Parameter selanjutnya dalam indikator kepemimpinan prosedural ini adalah munculnya tokoh karismatik. Kemunculan Anis Matta di tengah badai politik yang menerpa PKS seperti membawa angin segar dan harapan baru bagi PKS untuk mampu bangkit menghadapi Pemilu Legislatif 2014. Anis Matta memang bukan orang baru di PKS. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKS selama tiga periode sejak tahun 2003. Ia banyak dikenal dan disenangi di PKS. Setelah menjabat sebagai Presiden PKS pada tahun 2013, ia kerap menemui para kader di daerah untuk memberikan semangat dan meyakinkan bahwa PKS optimis dapat mendulang banyak suara dan mempertahankan eksistensinya pada Pemilu Legislatif 2014.

Anis Matta berada di puncak kewenangannya sebagai pimpinan partai untuk membangkitkan kembali semangat para kader PKS. Setelah ditetapkan sebagai Presiden PKS, ia berbicara di hadapan publik bahwa apa yang dihadapi PKS adalah sebuah konspirasi besar yang bertujuan menghancurkan partainya, sehingga ia ingin kasus tersebut dijadikan sebagai pembersihan diri sekaligus momentum kebangkitan PKS. Saat diundang di program *Gestur TVOne* (14 Maret 2013), Anis Matta meluruskan bahwa kata konspirasi bukan ditujukan untuk pihak lain, melainkan untuk sekadar menenangkan kader-kader PKS yang kecewa dan marah atas apa yang telah terjadi. PKS kiranya berusaha membentuk isu politik di media massa bahwa kasus LHI tersebut merupakan bentuk konspirasi terhadap PKS dan strategi untuk menghancurkan PKS (Arifin 2014).

Menurut Anis Matta, kader saat itu telah kehilangan tiga hal, yaitu harapan, kebanggaan kepada partainya sendiri, dan yang terpenting adalah kepercayaan diri. Tiga hal tersebut merupakan sumber energi yang membuat seseorang bisa bergerak dan bekerja, sehingga jika hal tersebut hilang, maka orang akan lumpuh. Anis Matta yang saat itu dipercaya dapat menyelamatkan partai kemudian menemukan satu kata yang dapat menghadirkan tiga hal itu kembali seketika dan memicu adrenalin kader untuk kembali berjuang. Kata “konspirasi” menurut Anis Matta adalah yang paling tepat, walaupun kemudian banyak pihak yang menyayangkan Anis mengeluarkan kata tersebut karena terkesan menuduh apa yang dilakukan KPK terhadap LHI adalah sebuah konspirasi.

Kepemimpinan Anis Matta di tengah badai yang menimpa PKS itu kemudian dinilai cukup berhasil setelah perolehan suara PKS pada Pemilu Legislatif 2014 hanya turun 1,09 persen dari Pemilu Legislatif 2009. Hal ini sangat jauh dari perkiraan lembaga-lembaga survei sebelumnya yang meramalkan kemerosotan tajam suara PKS pada Pemilu Legislatif 2014 pasca diterpa kasus LHI. Dengan wawasan yang luas dan pengalamannya berkecimpung di PKS, Anis Matta ternyata mampu mempertahankan kursi perolehan suara PKS pada Pemilu Legislatif 2014. Keputusannya mengambil posisi kepemimpinan di kala partai sedang dihantam kasus korupsi hingga kemudian mampu menyelamatkan partai membuat Anis Matta pantas disebut tokoh karismatik PKS. Hal ini terlihat dari imbauan-imbauan dan pembawaannya yang optimis sehingga mampu memengaruhi kader dan simpatisan untuk tidak berhenti berjuang.

Mekanisme Resolusi Konflik

Pada bagian ini, akan dijelaskan bagaimana sebuah partai politik dapat mengelola dan menghentikan konflik dengan lembaga-lembaga yang sengaja dibentuk untuk menangani masalah-masalah internal partai. Terdapat dua tingkat resolusi konflik, yaitu pencegahan konflik dan penghentian konflik, yang dengan sedemikian rupa akan direfleksikan pada internal PKS.

PKS dikenal sebagai partai kader yang memiliki karakteristik yang solid. Tetapi, sudah menjadi rahasia umum bahwa di tengah soliditas PKS, terdapat juga

perselisihan internal PKS yang terbagi ke dalam dua faksi, yaitu faksi keadilan dan kesejahteraan atau faksi idealis dan pragmatis atau faksi konservatif dan progresif (Munandar 2011: 84). Keberadaan faksi di tubuh PKS berawal dari Pemilu Presiden 2004 yang memunculkan spekulasi perpecahan internal partai, di mana saat itu muncul tafsiran mengenai “faksi keadilan” yang mendukung Amien Rais dan “faksi kesejahteraan” yang menjagokan Wiranto.

Kubu idealis yang menggambarkan kelompok kader PKS yang dipersepsikan lebih idealis disebut “faksi keadilan.” Di dalamnya terdapat ‘tokoh-tokoh tua’ PKS seperti Salim Segaf Al-Jufri, Sohibil Iman dan Tifatul Sembiring. Sedangkan kubu pragmatis disebut “faksi kesejahteraan” dengan tokoh-tokoh seperti Anis Matta, Fahri Hamzah, dan Mahfudz Siddiq. Pendukung Anis Matta yang kerap disebut sebagai “kalangan muda” kemudian seperti ditentang oleh ‘tokoh-tokoh tua’ seperti Rahmat Abdullah dan Yusuf Supendi. Pengelompokan muda dan tua ini sebenarnya tidak dapat dikatakan sepenuhnya benar karena ‘tokoh tua’ seperti K.H. Hilmi Aminuddin kenyataannya justru sangat dekat dengan Anis Matta dan kerap meluruskan jalan kalangan muda.

Menjelang Pemilu Legislatif 2014, terdapat riak konflik yang cukup menguat muncul ke permukaan antara kedua faksi dalam PKS tersebut. Meskipun hal ini tidak sekuat perselisihan PPP dan Golkar yang sempat diterpa isu penggulingan ketua umumnya masing-masing. Konflik antara dua faksi di tubuh PKS ini muncul karena keduanya memiliki perbedaan pandangan terutama dalam merespons kasus LHI dan isu kenaikan BBM pada pertengahan tahun 2013.

Pasca LHI ditetapkan sebagai tersangka, PKS menerjunkan tim hukum yang akan membantu kelancaran sidangnya. Tim hukum ini salah satunya beranggotakan Fahri Hamzah yang berada dalam faksi kesejahteraan. Tim hukum PKS ini memang tidak mendampingi proses hukum LHI secara langsung, tetapi ia dibentuk untuk bekerjasama dengan tim penasihat hukum LHI dengan harapan proses penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan lancar. Berbeda dengan Fahri Hamzah, Tifatul Sembiring yang saat itu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di era SBY, menilai bahwa semua pihak mesti menghormati keputusan pengadilan. Posisi Tifatul sebagai menteri mungkin menjadi salah satu alasan untuk dia terkesan pasrah dan manut dengan putusan pengadilan terhadap kasus LHI. Tifatul Sembiring mewakili suara faksi keadilan yang memiliki perbedaan sikap dengan Fahri Hamzah dari faksi kesejahteraan dalam menyikapi kasus LHI.

Selain itu, kedua faksi di tubuh PKS ini juga memicu konflik internal PKS saat pemerintahan SBY berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada pertengahan tahun 2013. Konflik ini pun kembali melibatkan Fahri Hamzah dan Tifatul Sembiring. Keduanya memiliki pandangan berbeda dan berseberangan. Fahri Hamzah yang saat itu menjabat Wasekjen PKS bersuara keras menolak kenaikan BBM. Sikap elite PKS itu kemudian dikritik berbagai pihak, termasuk anggota koalisi partai pemerintah. Menurut mereka, PKS sebagai anggota Sekretariat Gabungan seharusnya mendukung kebijakan pemerintah.

Hal ini, misalnya, dilakukan oleh Tifatul Sembiring yang menyarankan PKS untuk mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM, meskipun ia tahu bahwa keputusan partai tetap tergantung pada Majelis Syura. Menurut Siti Zuhro, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sebagai Menkominfo, sikap Tifatul Sembiring sudah benar dalam mendukung pemerintah. Tifatul Sembiring adalah pembantu Presiden SBY sehingga walaupun ia ingin pindah partai, karena PKS tidak sepakat menaikkan harga BBM, maka hal itu tidak menjadi masalah.

Namun, perbedaan pandangan kedua faksi di tubuh PKS tersebut tidak menimbulkan konflik yang serius di dalam internal partai. Meskipun PKS sempat diberitakan terpecah karena isu kasus hukum LHI dan kenaikan BBM, pada kenyataannya hal tersebut tidak memengaruhi soliditas partai menjelang Pemilu Legislatif 2014. Tifatul Sembiring yang menginginkan PKS mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM, pada akhirnya ia juga harus manut dengan putusan Majelis Syura yang menolak kenaikan harga BBM. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan konflik dalam internal partai berjalan dengan baik sehingga tidak sampai mengganggu soliditas PKS dalam Pemilu Legislatif 2014. Kiranya pengurus dan kader PKS menyadari bahwa riak konflik internal adalah bagian dari dinamika partai yang menjadi karakter konsolidasi demokratis partai dalam meraih dukungan suara pemilih.

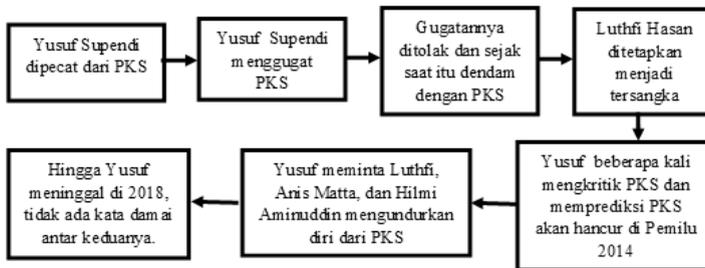
Namun, selain pengelolaan konflik dalam merespons kasus hukum LHI dan kenaikan harga BBM tahun 2013, PKS juga pernah mengelola konflik internal yang diselesaikan tanpa penyelesaian yang jelas. Hal ini, misalnya, terlihat dalam konflik PKS dengan mantan kadernya, yaitu Yusuf Supendi. Meskipun PKS memiliki mekanisme resolusi yang baik, pada kenyataannya terdapat konflik di internal PKS yang terjadi berkepanjangan dan hanya menjadi tontonan publik tanpa penyelesaian yang jelas.

Konflik antara Yusuf Supendi dengan elit PKS terjadi ketika ia merasa sakit hati dan menyimpan dendam karena dipecat secara tidak hormat dari PKS pada tahun 2010. Konflik PKS dengan Yusuf Supendi bermula pada saat menjelang Pemilu Presiden 2004. Muncul percikan perpecahan di internal PKS menyikapi calon presiden yang diusung partai antara Amien Rais dan Wiranto. Untuk meredam perpecahan internal partai tersebut, sempat dilakukan beberapa kali pemungutan suara dan menghasilkan dukungan terhadap Amien Rais.

Yusuf Supendi sangat marah atas sikap Hilmi Aminuddin sebagai Ketua Majelis Syura yang selalu menggunakan hak veto untuk menggagalkan dukungannya terhadap Wiranto. Sejak saat itu, Yusuf Supendi selalu menjadi tokoh yang mengambil sikap kritis terhadap pelbagai kebijakan PKS. Sikap Yusuf Supendi yang vocal dalam mengkritik PKS membuat partai tersebut mengeluarkan kebijakan tahun 2008 yang melarang kader PKS untuk berhubungan dan berinteraksi dengan Yusuf Supendi. Di dalam PKS, Majelis Syura memang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan partai dan kadernya. Lembaga ini berwenang mendeteksi adanya konflik bersama-sama dengan lembaga *halaqah*, Dewan Syariah dan Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) (Noor 2015: 274).

Yusuf Supendi, yang meninggal pada bulan Agustus 2018, sebelumnya mengaku bahwa tidak ada perdamaian setelah konflik berkepanjangan antara dirinya dengan elit PKS. Ia mengaku bahwa ia tidak ada lagi komunikasi dengan Hilmi Aminuddin. Menurut penjabarannya, ia sudah kecewa karena pasca pemecatan dirinya, Hilmi Aminuddin sempat menjanjikan tiga kali bertemu di Lembang tetapi dibatalkan melalui orang lain. Sejak saat itu hingga kematiannya, ia tak mau lagi ke Lembang. Ia pun sempat berharap bahwa jika Hilmi Aminuddin mempunyai itikad baik, seharusnya Hilmi Aminuddin yang harus mendatangnya. Meskipun PKS belum mampu menghentikan konflik dengan Yusuf Supendi, PKS mencoba meyakinkan publik bahwa dengan dipecatnya Yusuf Supendi, konflik antar keduanya berakhir. Di sisi lain, Yusuf Supendi justru masih merasa dizalimi dan menganggap konflik dengan elit PKS belum menemukan kata damai hingga pada detik terakhir kematiannya. Secara ringkas, siklus konflik Yusuf Supendi dengan elite PKS dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah.

Gambar 2
Siklus Konflik Yusuf Supendi dengan Elit PKS



Sumber: Diolah oleh Penulis

Sistem Pengkaderan

Selain kepemimpinan prosedural dan mekanisme pengelolaan konflik yang baik, upaya PKS dalam melakukan konsolidasi kelembagaan partai pada Pemilu Legislatif 2014 juga dilakukan dengan memperkuat basis kaderisasi partai. Sebagai partai kader, meskipun melakukan strategi politik terbuka dengan merekrut calon anggota legislatif dari kalangan non-Muslim untuk Indonesia Timur terutama pasca Mukernas Bali tahun 2008, PKS tetap mengandalkan sistem pengkaderan di internal partainya sendiri dan tidak tertarik untuk merekrut caleg dadakan untuk meraih suara.

Karena itu, dalam AD/ART PKS Pasal 9 disebutkan bahwa partai menyelenggarakan rekrutmen dan kaderisasi anggota. Rekrutmen berfungsi untuk mengisi posisi internal dan anggota parlemen. DPP PKS melalui Departemen Kaderisasi menyediakan seperangkat kurikulum dan pedoman praktis pelaksanaan kaderisasi dan mengomunikasikannya ke seluruh departemen kaderisasi di Indonesia. Partai menyadari bahwa kekuatan utama partai bergantung pada pertumbuhan kader, baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas.

Slogan PKS sebagai partai kader sempat dipertanyakan seiring dengan isu menurunnya soliditas kader PKS jelang Pemilu Legislatif 2014 terutama terkait keputusan merekrut calon anggota legislatif dari kalangan non-Muslim yang dilakukan sejak Pemilu Legislatif 2009. Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa elektabilitas PKS mengalami penurunan dibanding Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilu Legislatif 2009, yakni di angka 6,1 persen.¹ Penyebab penurunannya tersebut bukan hanya terkait dengan isu korupsi yang melibatkan Presiden PKS LHI, tetapi, menurut Direktur LSIN, Yasin Mohammad, juga terkait dengan tidak adanya kesepahaman atau sevisi para kader PKS.² Menurutnya, kehancuran PKS dimulai saat partai itu mulai memosisikan diri sebagai partai yang inklusif dengan menerima kader non-Muslim terutama pasca Mukernas Bali 1-3 Februari 2008. Sejak sistem kaderisasi di PKS berubah total, kader yang menduduki jabatan penting di PKS tidak lagi didasarkan pada sosok pribadi yang telah memiliki kualitas keagamaan yang unggul dan melalui proses panjang sistem kaderisasi di internal PKS. Penentuan calon kepala daerah yang diusung dan rekrutmen caleg PKS juga dianggap tidak mempertimbangkan kualitas kader.

Di dalam AD/ART baru memang tidak secara eksplisit mengatur klausul keanggotaan non-Muslim. Tidak ditemukan kalimat yang menjelaskan secara jelas bahwa kalangan non-Muslim bisa menjadi anggota PKS. PKS hanya membagi keanggotaan menjadi dua kategori, yaitu kader dan anggota. Kader adalah anggota yang terikat penuh dengan AD/ART partai dan terikat penuh dengan sistem kaderisasi yang berbasis keislaman. Sedangkan yang masuk kategori anggota adalah setiap WNI yang terikat penuh dengan organisasi. Sehingga anggota bersifat lebih umum dan terbuka bagi siapapun dan dari golongan serta agama apapun.³

Legalisasi keanggotaan non-Muslim terjadi bukan tanpa alasan karena berdasarkan pertimbangan semakin banyaknya pendukung PKS dari kalangan non-Muslim di Indonesia Timur seperti di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Pernyataan menarik disampaikan oleh Abdul Munir Mulkan bahwa non-Muslim tidak akan dilibatkan dalam Majelis Syura PKS.⁴ Menurutnya, jika anggota Majelis Syura

1 "Pengakuan Menjelang Ajal Yusuf Supendi". *Cnnindonesia.com*, 4 Agustus 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180804132337-77-319475/pengakuan-menjelang-ajal-yusuf-supendi>

2 "Inilah Akar Kehancuran PKS". *Beritasatu.com*, 27 Februari 2014, <https://sp.beritasatu.com/home/inilah-akar-kehancuran-pks/50263>

3 "Keterbukaan ala PKS". *Kompas.com*, 18 Juni 2010, <https://nasional.kompas.com/read/2010/06/18/1140588/keterbukaan.ala.pks>

4 "Keterbukaan ala PKS". *Kompas.com*, 18 Juni 2010, <https://nasional.kompas.com/read/2010/06/18/1140588/keterbukaan.ala.pks>

sudah ada yang berasal dari non-Muslim, maka menandakan bahwa ideologi PKS telah berubah karena Majelis Syura adalah pimpinan tertinggi partai dan di sanalah segala kebijakan partai ditentukan. Dengan demikian, ideologi PKS tetap terjaga meskipun PKS sudah mendeklarasikan sebagai partai terbuka dengan menerima anggota non-Muslim. Hal ini dapat menjadi pedoman bagi PKS karena terbukti hingga sekarang anggota Majelis Syura tidak ada yang berstatus non-Muslim.

Dalam konteks Pemilu Legislatif 2014, Sekjen PKS Taufik Ridho sempat mengatakan bahwa partainya untuk DPR Pusat mengusung dua caleg non-Muslim dari dapil Papua dan Papua Barat.⁵ Tetapi, pada kenyataannya data di KPU Pusat menunjukkan tidak ada satu pun caleg PKS di tingkat nasional berlatar belakang non-Muslim yang maju menjadi kandidat Pemilu Legislatif 2014. Meskipun sejumlah provinsi didominasi penduduk non-Muslim seperti Bali, Sulawesi Utara, NTT, dan Papua, tetapi data di website resmi KPU (kpu.go.id) menunjukkan bahwa tidak ada satu pun caleg non-Muslim dari PKS. Data ini menunjukkan bahwa sulit bagi non-Muslim untuk maju menjadi caleg PKS sehingga sulit dikatakan PKS sebagai partai terbuka meskipun pada tahun 2008 partai ini telah mendeklarasikan sebagai partai terbuka.

Parameter lainnya dalam upaya konsolidasi kelembagaan PKS pada Pemilu Legislatif 2014 melalui sistem kaderisasi adalah soal rekrutmen kader. Dalam memutuskan kader mana yang akan mewakili partai di pemilihan umum, PKS membuat sejumlah tahapan evaluasi untuk menelaah secara mendalam kemampuan politik dan kepribadian kandidat, yang akhirnya akan menentukan kelayakan mereka. Partai juga menyelenggarakan pemilihan internal sebagai proses untuk memutuskan siapa saja yang dapat menjadi caleg. Melalui proses transparan yang melibatkan banyak kader, partai dapat menghindari kecenderungan kolusi dan nepotisme. Hal ini karena elite partai bukanlah satu-satunya pihak yang terlibat dan menentukan proses rekrutmen, melainkan juga ribuan kader inti yang harus pula dipertimbangkan aspirasi dan pendapatnya (Noor 2015:345).

Dalam konteks ini, PKS dalam menjaring caleg eksternal akan memilih orang yang memiliki dukungan di luar massa PKS. Hal itu disampaikan oleh salah satu pimpinan DPP PKS, Nasir Djamil, yang mengatakan bahwa partainya lebih mendorong kader internal yang sudah teruji kemampuannya sehingga pada di Pileg 2014 PKS tidak mengusung caleg artis.⁶ Hal ini terkonfirmasi oleh Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid yang mengatakan bahwa tidak ada satu pun artis yang masuk dalam daftar caleg PKS.⁷ Ia menambahkan bahwa partainya bukanlah anti-artis, melainkan lebih mengutamakan kader yang dirasa sudah cukup memenuhi kualifikasi. Namun, PKS pada Pileg 2014 juga membuka ruang bagi

5 "Ada Pendeta Jadi Caleg PKS". *Republika.co.id*, 22 April 2013, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/04/22/mlneiy-ada-pendeta-jadi-caleg-pks>

6 "PKS Utamakan Kader Ketimbang Rekrut Artis Jadi Caleg". *Sindonews.com*, 29 Januari 2013, <https://nasional.sindonews.com/read/711976/12/pks-utamakan-kader-ketimbang-rekrut-artis-jadi-caleg-1359427597>

7 "Tak Ada Artis dalam Daftar Caleg PKS". *Kompas.com*, 9 April 2013, <https://nasional.kompas.com/read/2013/04/09/14301054/tak.ada.artis.dalam.daftar.caleg.pks>

caleg eksternal, yang mana terdapat tiga syarat untuk bisa menjadi mencalonkan diri: tidak memiliki catatan hukum, tidak mempunyai cacat moralitas, dan memiliki keluarga yang relatif stabil.⁸

Pemaparan Tabel 1 di bawah menunjukkan bahwa PKS serius dalam menjangkau caleg, baik yang internal maupun eksternal. Meskipun partai ini membuka jalan bagi non-kader termasuk artis untuk dapat mencalonkan diri sebagai caleg, namun mereka tidak mudah untuk lolos karena PKS hanya akan mencari kandidat yang memang sejalan dengan visi dan misi partai, bukan hanya bermodalkan popularitas. Tidak seperti partai Islam lainnya seperti PAN, PKB, dan PPP yang masing-masing mengusung caleg artis. Hal ini yang membedakan PKS dengan partai lainnya. Selain itu, PKS telah berhasil memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dengan jumlah caleg perempuan mencapai 38,8 persen di seluruh daerah pemilihan.

Tabel 1
Data Profil Caleg PKS 2014 untuk DPR RI

Kategori	Keterangan	
Jenis Kelamin	Laki-laki: 301 (61,2 %)	Perempuan: 191 (38,8%)
Keterlibatan Artis	Tidak ada satu pun artis masuk daftar caleg PKS	
Keterwakilan non-Muslim	Tidak ada satu pun non-Muslim masuk daftar caleg PKS	

Sumber: Diolah oleh Penulis.

Komitmen terhadap Nilai dan Ideologi

Konsolidasi kelembagaan PKS melalui penguatan komitmen nilai dan ideologi ini diwujudkan dengan platform partai dan komitmen kader. Platform partai terkait dengan upaya PKS dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam, sedangkan komitmen kader menekankan pada personal kadernya dalam menjalankan nilai-nilai tersebut pada Pemilu Legislatif 2014. Inilah apa yang disebut oleh Randall dan Svásand (2002: 14) sebagai konsolidasi dimensi internal partai dalam aspek sikap melalui penguatan nilai (*value infusion*). Ia mencakup sejauh mana aktor dan pendukung partai memperoleh sebuah identifikasi dan komitmen terhadap partai yang melebihi insentif keterlibatan diri dalam partai tersebut.

Secara ideologis, dalam menjalankan strategi politiknya, PKS berada dalam dilema antara syariah dan suara. Ia seperti sedang mendayung di antara dua karang, yakni memilih strategi partai dengan menekankan pada representasi basis sosialnya sebagai partai dakwah atau logika kompetisi elektoral yang bersifat pragmatis

⁸ "Ini 2 syarat untuk bisa jadi caleg PKS". *Detik.com*, 25 Januari 2013, <https://news.detik.com/berita/2152156/ini-3-syarat-untuk-bisa-jadi-caleg-pks>

dalam memperjuangkan suara (Muhtadi 2012:222). Bila PKS memilih untuk mengedepankan representasi ideologis basis sosial partai yang memperjuangkan dakwah nilai-nilai Islam, maka konsekuensinya membuat cakupan pemilih PKS menjadi terbatas, sehingga sulit memenangkan pemilu atau sekadar masuk tiga besar suara tertinggi. Begitu pun sebaliknya, bila strategi pragmatis partai dengan memperjuangkan suara secara terbuka, maka kader partai akan banyak yang kecewa. Ideologi PKS sebagai partai dakwah menjadi dipertanyakan.

Menurut Permata (2008), meskipun ideologi PKS sebagai partai dakwah cukup kuat, kadang terdapat pula perbedaan antara ideologi PKS dan perilaku partainya dalam momen-momen tertentu. Hal ini bukanlah hasil dari rencana yang disengaja atau agenda tersembunyi PKS untuk menipu permainan demokratis, melainkan pengaruh pragmatisme institusi yang tidak dapat dihindari terhadap perilaku aktor politiknya. Hal yang sama dinyatakan Hidayat (2012) bahwa PKS memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengekspresikan ideologinya sehingga ia mampu mengembangkan prosedur dan program organisasi internal berdasarkan prinsip-prinsip agama. Namun, meskipun dinilai telah berhasil dalam mengembangkan partai yang efektif dan solid, PKS masih memiliki banyak masalah dalam memperoleh dukungan selama pemilu karena moderasi penyesuaian pragmatismenya menghasilkan kebingungan secara internal dan eksternal.

Akhirnya, dalam konteks Pemilu Legislatif 2014, PKS menegaskan komitmennya pada ideologi dan nilai yang dianutnya sebagai partai dakwah. Hal inilah yang membuat ceruk suara PKS sebagai partai kader tidak ditinggalkan oleh pemilihnya yang militan dan solid. Platform Kebijakan Pembangunan PKS menegaskan kembali karakteristik PKS sebagai partai dakwah itu. Ia bahkan bukan sekadar demi kepentingan memperjuangkan kekuasaan dalam rutinitas pemilu lima tahunan saja, tetapi juga berlaku bagi penegasan ideologi partai secara jangka panjang yang menjalankan kerja-kerja kultural dalam pembangunan umat dan peradaban. Karena itu, bisa dipahami bila tekad PKS sebagai sebuah institusi dakwah tidak berubah. Dalam sebuah diskusi platform kebijakan pembangunan PKS, politikus PKS, Sohibul Iman, menjabarkan platform visi, misi, dan prioritas PKS pada Pemilu Legislatif 2014. Menurutnya, dengan ideologi berasas Islam, PKS sadar apa yang menjadi dasar dan bahan inspirasinya adalah Islam.⁹

Selain itu, komitmen pada ideologi partai sebagai upaya penguatan konsolidasi PKS pada Pemilu Legislatif 2014 memiliki konsekuensi politik bahwa PKS mengambil sikap untuk tidak berada dalam satu koalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal ini secara konsisten terbukti dalam persaingan politik di tingkat nasional, meskipun di beberapa daerah koalisi PKS-PDIP seringkali terjadi karena aktor politik Islam mengandalkan perhitungan rasional daripada pertimbangan ideologis (Sukmajati 2011). Hal ini juga kemudian berdampak pada usungan calon presiden dari PKS yang akan selalu berseberangan dengan PDIP. Ketika presiden yang diusung oleh PDIP, Joko

9 "Platform PKS di 2014". *Sindonews.com*, 7 Januari 2014, <https://nasional.sindonews.com/read/824289/12/platform-pks-di-2014-1389080246>

Widodo, memenangkan Pemilu Legislatif 2014 dan 2019, maka secara konsisten PKS menjadi partai “oposisi” dan tidak berada dalam lingkaran pemerintah. Perbedaan ideologi partai antara PDIP sebagai partai nasionalis dan PKS sebagai partai dakwah membuat keduanya tidak pernah berada dalam satu koalisi di tingkat nasional.

Dalam konteks Pemilu Legislatif 2014, konsolidasi kelembagaan PKS dalam aspek komitmen ideologis ini dibuktikan dalam penguatan platform dan prioritas partai yang berasaskan Islam, tidak adanya caleg non-Muslim, dan sikap politik PKS yang tidak berkoalisi dengan PDIP. Akibatnya, meskipun pasca kasus LHI kepercayaan masyarakat terhadap PKS semakin menurun, beberapa keputusan dan sikap partai di atas memperkuat komitmen kader secara ideologis sehingga cukup berhasil menguatkan kembali kepercayaannya.

Karena itu, upaya konsolidasi kelembagaan PKS melalui infusi ideologi partai terus-menerus dilakukan untuk memperkuat komitmen para kadernya. Sebagai partai dakwah, PKS berusaha menguatkan komitmen para kadernya agar memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai bersama dan tidak menyimpang dari ideologi partai. Hal ini misalnya, dilakukan melalui kegiatan *halaqah* pada level kader biasa atau *usrah* pada level elit partai. Secara formal, kegiatan tersebut disebut juga dengan Taklim Rutin Mingguan (TRM). Proses infusi ideologi ini tidak berhenti, meskipun para kader telah menempati posisi sebagai anggota parlemen atau kepala daerah.

Melalui upaya tersebut, komitmen ideologis para kader terhadap PKS di tengah kekecewaan terhadap kasus LHI menjadi meningkat kembali sehingga tidak menciutkan semangat mereka untuk berjuang pada Pemilu Legislatif 2014. Hal ini, misalnya, terbukti dengan tidak adanya kader PKS yang mengundurkan diri pasca kasus LHI tersebut. Sikap kader tersebut tentunya tidak terlepas dari komitmen ideologis kader yang ditanamkan melalui kegiatan *halaqah* dan berbagai pelatihan lainnya yang menanamkan loyalitas terhadap partai. Inilah yang membuat kader PKS memiliki komitmen ideologis yang tinggi dalam menjalankan nilai-nilai bersama yang berdampak pada keberhasilan PKS untuk memelihara soliditasnya di tengah badai yang menerjang internal partainya.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, artikel ini telah menunjukkan bahwa dalam Pemilu Legislatif 2014, di tengah prahara politik karena penangkapan pemimpinnya, Luthfi Hasan Ishaq (LHI), PKS berhasil mempertahankan soliditas partainya dalam menjaga perolehan suaranya dengan memperoleh 6.79 persen suara. Ini berarti penurunan suara yang sedikit sebesar 1 persen dari perolehan suara pada pemilu tahun 2009. Analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa keberhasilan mempertahankan perolehan suara ini terkait erat dengan konsolidasi internal kelembagaan yang dilakukan PK melalui empat upaya, yaitu: kepemimpinan

prosedural, mekanisme resolusi konflik yang dikelola dengan baik, sistem kaderisasi, dan komitmen kuat terhadap nilai dan ideologi yang dianut bersama.

Melalui empat upaya tersebut, soliditas PKS berhasil dijaga dengan baik. Sebagai partai kader, PKS terbukti memiliki karakteristik yang solid yang didukung oleh fondasi ideologi yang kuat, kepemimpinan yang baik, dan kader-kader yang militan. Konsolidasi kelembagaan PKS pada Pemilu Legislatif 2014 berhasil membendung citra negatif terhadap partai tersebut sehingga relatif tidak berpengaruh besar terhadap perolehan suara partai. Secara teori kelembagaan partai, pengalaman PKS tersebut menunjukkan upaya konsolidasi internal partai melalui pengokohan kesisteman secara struktural dan peneguhan ideologi partai secara konsisten sehingga menguatkan kepercayaan para kader. Ini merupakan sebuah konsolidasi partai berbasis agama yang menandai dinamika konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Referensi

- “Ada Pendeta Jadi Caleg PKS”. *Republika.co.id*, 22 April 2013. Diambil dari (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/04/22/mlnei-y-ada-pendeta-jadi-caleg-pks>)
- Arifin, Zaenal. 2014. “Sikap Politik Partai Keadilan Sejahtera terhadap Kasus Luthfi Hasan Ishaq dalam Korupsi Impor Daging”. Skripsi. Diambil dari (<http://digilib.uin-suka.ac.id/14815/>).
- Aspinall, Edward dan Ward Berenschot. 2019. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Damanik, Ali Said. 2002. *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*. Jakarta: Teraju.
- “Faksi dalam PKS”. *Politik.lipi.go.id*, 23 April 2013. Diambil dari (<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/832-faksi-dalam-pks>)
- Hamayotsu, Kikue. 2011. “The Political Rise of the Prosperous Justice Party in Post-Authoritarian Indonesia: Examining the Political Economy of Islamist Mobilization in a Muslim Democracy.” *Asian Survey*, Vol. 51 (5): 971-992.
- Hasan, Noorhaidi. 2012. “Islamist Party, Electoral Politics and Da’wah Mobilization among Youth: The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia.” *Journal of Indonesian Islam*, 6 (1): 17-47.
- Hidayat, Syahrul. 2012. “Managing Moderation: The AKP in Turkey and the PKS in Indonesia”. Disertasi. University of Exeter.

- Hilmy, Masdar. 2010. *Islamism and Democracy in Indonesia: Piety and Pragmatism*, Singapore: ISEAS.
- “Inilah Akar Kehancuran PKS”. *Beritasatu.com*, 27 Februari 2014. Diambil dari (<https://sp.beritasatu.com/home/inilah-akar-kehancuran-pks/50263>)
- “Ini 2 syarat untuk bisa jadi caleg PKS”. *Detik.com*, 25 Januari 2013. Diambil dari (<https://news.detik.com/berita/2152156/ini-3-syarat-untuk-bisa-jadi-caleg-pks>)
- “Mengukur Partai Terkorup”. *ICW*. Diambil dari (<https://antikorupsi.org/id/news/mengukur-partai-terkorup>)
- “Kader PKS Cemas Kasus Luthfi Pengaruhi Pemilu 2014”. *Beritasatu.com*, 1 Februari 2013. Diambil dari (<http://sp.beritasatu.com/home/kader-pks-cemas-kasus-luthfi-pengaruhi-pemilu-2014/30040>)
- “Keterbukaan ala PKS”. *Kompas.com*, 18 Juni 2010. Diambil dari (<https://nasional.kompas.com/read/2010/06/18/1140588/keterbukaan.ala.pks>)
- “Kisah Yusuf Supendi, Dibuang PKS Dirangkul PDIP”. *Kumparan.com*, 17 Juli 2018. Diambil dari (<https://kumparan.com/@kumparannews/kisah-yusuf-supendi-dibuang-pks-dirangkul-pdip-27431110790547472>)
- “Kisah Mulusnya Pergantian Presiden PKS dari Luthfi Hasan ke Anis Matta”. *Tribunnews.com*, 2 Februari 2013. Diambil dari (<http://www.tribunnews.com/nasional/2013/02/02/kisah-mulusnya-pergantian-presiden-pks-dari-luthfi-hasan-ke-anis-matta?page=2>)
- Komisi Pemilihan Umum, <https://pemilu2014.kpu.go.id>. Diakses pada 11 Juni 2020.
- Machmudi, Yon. 2006. “Islamizing Indonesia: the Rise of Jamaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party”. Disertasi. The Australian National University.
- MPP PKS. 2008. *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera*. Jakarta: Majelis Pertimbangan Pusat.
- Muhtadi, Burhanudin. 2012. *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. Jakarta: Gramedia
- Munandar, Arief. 2011. “Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004.” Disertasi. Universitas Indonesia.
- Noor, Firman. 2012. “Institutionalising Islamic Political Parties in Indonesia: A Study of Internal Fragmentation and Cohesion in The Post-Soeharto Era (1998-2008)”. Disertasi. University of Exeter.
- Noor, Firman. 2015. *Perpecahan dan Soliditas Partai Islam: Kasus PKB dan PKS di Dekade Pertama Reformasi*. Jakarta: LIPI Press.
- Nurdin, Ahmad Ali. 2009. “Islamic Political Parties and Democracy: A Comparative Study of PKS in Indonesia and PAS in Malaysia (1998-2005)”. Disertasi. National University of Singapore.

- Nuridin, Ahmad Ali. 2019. "The Influence of Middle Eastern Islamic Political Thought on Islamic Political Parties in Indonesia: The Case of PKS." *GJAT*, Vol. 9 (3):27-37.
- "Pengkakuan Menjelang Ajal Yusuf Supendi". *Cnnindonesia.com*, 4 Agustus 2018. Diambil dari (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180804132337-77-319475/pengkakuan-menjelang-ajal-yusuf-supendi>)
- "Pengamat: Friksi Faksi Keadilan dan Sejahtera Menguat". *Republika.co.id*, 19 Juni 2013. Diambil dari (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/06/19/momvwy-pengamat-friksi-faksi-keadilan-dan-sejahtera-menguat>)
- Permata, Ahmad Norma. 2008. "Islamist Party and Democratic Participation: Prosperous Justice Party (PKS) In Indonesia 1998-2006". Disertasi. Universitas zu Munster.
- "Prahara Presiden PKS" *Apa Kabar Indonesia Pagi TVOne*. 31 Januari 2013. Diambil dari (<https://www.youtube.com/watch?v=Fbu4yvXhohE&t=20s>)
- "PKS Utamakan Kader Ketimbang Rekrut Artis Jadi Caleg". *Sindonews.com*, 29 Januari 2013. Diambil dari (<https://nasional.sindonews.com/read/711976/12/pks-utamakan-kader-ketimbang-rekrut-artis-jadi-caleg-1359427597>)
- "Platform PKS di 2014". *Sindonews.com*, 7 Januari 2014. Diambil dari (<https://nasional.sindonews.com/read/824289/12/platform-pks-di-2014-1389080246>)
- Rahmat, Imdadun. 2008. *Ideologi Politik PKS: dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, Yogyakarta: LKiS.
- Randall, Vicky and Lars Svåsand. 2002. "Party Institutionalization in New Democracies". *Party Politics*, Vol. 8 (1): 5-29.
- Rumata, Vincent M. 2016. "Peluang dan Tantangan Big Data dalam Penelitian Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Literature". *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 20 (1):155- 167.
- "Saat PKS Menepis Badai". *Gestur TVOne*, 14 Maret 2013. Diambil dari (<https://www.youtube.com/watch?v=A8tzCQwjSPA&t=525s&index=3&list=LLi4D2mZm0x-9CK-XXLhIZPCg>)
- Sukmajati, Mada. 2011. "How Islamic Parties Organize at the Local Level in Post-Suharto Indonesia: An Empirical Study of Six Major Islamic Parties in the Tasikmalaya District, West Java Province". Disertasi. Universitas Heidelberg.
- "Survei LSI: 4 Parpol Terancam Tak Lolos ke Parlemen". *Kompas.com*, 2 Februari 2014. Diambil dari (<https://nasional.kompas.com/read/2014/02/02/1830362/Survei.LSI.4.Parpol.Terancam.Tak.Lolos.ke.Parlemen>)

-
- “Tak Ada Artis dalam Daftar Caleg PKS”. *Kompas.com*, 9 April 2013. Diambil dari (<https://nasional.kompas.com/read/2013/04/09/14301054/tak.ada.artis.dalam.daftar.caleg.pks>)
- “Taufik Ridho Jabat Sekjen PKS”. *Kompas.com*, 1 Februari 2013. Diambil dari (<https://lifestyle.kompas.com/read/2013/02/01/15111854/Taufik.Ridho.Jabat.Sekjen.PKS>)
- Wessels, Bernhard dan Hans-Dieter Klingemann. 2006. “Parties and Voters— Representative Consolidation in Central and Eastern Europe?” *International Journal of Sociology*, Vol. 36(2):11-44.
- Widjojanto, Bambang. 2017. “Relasi Korupsi Korporasi dan Korupsi Politik: Kajian Awal Melacak Korupsi Politik di Korporasi,” *Integritas*, Vol. 3 (1): 32-52.